

TAJUK RENCANA

Selamatkan dari Erupsi dan Pandemi

STATUS Siaga yang diterapkan terkait kondisi Gunung Merapi sudah berlangsung sekitar tiga minggu. Saat-saat erupsipun diprediksi sudah kian dekat, meski tidak diketahui kapan waktunya. Indikasinya antara lain magma sudah kian mendekati puncak Merapi. Diperkirakan sumber tekanan magma saat ini berada pada kedalaman 1,3 kilometer dari puncak. (KR, Kamis 3/12).

Menghadapi kenyataan ini, kesiap-siagaan memang harus kian ditingkatkan. Artinya, ketika suatu saat status Merapi ditingkatkan menjadi Awas, maka informasi ini harus cepat bisa sampai kepada masyarakat, khususnya di kawasan rawan bencana (KRB) Merapi. Juga kepada pihak-pihak terkait, terutama yang terlibat dalam evakuasi pengungsi. Tentu saja sarana dan prasarana evakuasi harus selalu *standby*, sehingga saat harus bergerak tinggal jalan.

Sebagaimana diungkapkan Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Kalakhar BPBD) DIY, Drs Biworo Yuswanto MSi pada acara *Kedaulatan Rakyat Talkshow*, saat ini belum semua masyarakat di wilayah KRB Merapi diungsikan. Jumlahnya sekitar 16 orang. Namun demikian, system evakuasi dan prasarana yang dibutuhkan sudah disiapkan, sehingga nantinya bisa dilakukan evakuasi dengan cepat. Apalagi jarak erupsi dengan kenaikan status awas tidak bisa diprediksi. Bisa dalam hitungan jam setelah status dinaikkan.

Meski begitu, berbagai kemungkinan kondisi terburuk tetap harus diperhitungkan sekaligus diantisipasi. Karena bagaimanapun juga, sedetail dan serinci apapun sebuah perencanaan, belum tentu bisa berjalan mulus 100%. Hal-hal mendadak dan di luar dugaan bisa

saja terjadi. Karena itu, kesiapan semua pihak untuk menghadapi kondisi apapun harus terus diingatkan.

Karena dalam kondisi pandemic covid-19, kemungkinan terjadinya penularan virus Korona juga harus diperhitungkan, baik akibat interaksi saat evakuasi maupun saat pengungsi di barak. Dalam hal ini, para relawan yang akan melakukan evakuasi harus benar-benar dipastikan terbebas dari Covid-19. Sebab sangat mungkin terjadi sentuhan langsung saat melakukan evakuasi, misalnya menggandeng tangan atau bahkan menggendong orangtua.

Ketika berada di barak pengungsian, protokol kesehatan ketat harus diterapkan. Bahkan menurut Ketua Pengda Kagama DIY Ir Gatot Saptadi, selain memperhatikan gizi yang baik dan mengurangi daya tamping barak, peralatan mandi, makan dan minum pengungsi disediakan sendiri-sendiri, tidak boleh dicampur. Pengungsi juga harus dilindungi dari interaksi pihak luar.

Sebagaimana terjadi selama ini, selain banyak relawan, di pengungsian biasanya banyak kedatangan tamu yang ingin menyumbang. Mereka biasanya tidak mantap kalau tidak bertemu langsung dengan yang diberikan sumbangan. Bisa jadi interaksi menjadi tidak terkendali. Untuk itu, tamu yang datang juga mesti dipastikan tidak membawa virus Korona, disamping terus diingatkan untuk menerapkan prokes dan 3 M.

Kita berharap, tidak ada korban jika nantinya terjadi erupsi Merapi, baik korban diakibatkan letusan maupun penularan virus Korona. Tidak muncul klater pengungsian. Baik para pengungsi, relawan, dermawan, maupun semua pihak terkait tetap sehat semua bahkan pandemi segera berakhir, sehingga kehidupan kita menjadi normal seperti sedia kala. □

Tantangan Ketaatan pada Aturan Vaksinasi

Sahid Hadi

terhadap aturan vaksinasi.

Ketidaksediaan masyarakat tidak dapat dianggap keliru sepenuhnya. Sebab, dalam diskursus hak atas kesehatan, diakui setiap orang berkuasa penuh atas dirinya sendiri. Sehingga ia berdaulat untuk menentukan tindakan-tindakan kesehatan mana yang dapat atau tidak dapat dilakukan kepadanya. Kedaulatan atas diri sendiri inilah yang wajib dihormati pemerintah. Dengan begitu, upaya-upaya pem-



temuan Populi Center dapat mewujudkan dalam bentuk riset dan pemetaan lanjutan yang insiatifnya harus diajukan pemda. Riset lanjutan ini dilakukan dalam rangka memetakan tiga hal.

Pertama, persentase ketidaksediaan masyarakat di daerah untuk divaksin. Kedua, latar belakang di balik ketidaksediaan masyarakat di daerah untuk divaksin. Dua hal ini perlu dipetakan di daerah. Lantaran temuan tentangnya akan berguna secara signifikan sebagai data dalam penyusunan kebijakan terkait percepatan dan kelancaran pelaksanaan vaksinasi di daerah. Ketiga, model kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan sosial di daerah.

Kita sepatutnya belajar dari temuan Populi Center tadi. Ketidaksediaan sebagai masyarakat untuk divaksin ternyata tidak sepenuhnya dilatarbelakangi pembangkangannya terhadap aturan Perpres No 99/2020. Namun, ini juga terjadi karena adanya kerangka penafsiran dan pemaknaan yang berbeda-beda atau tidak utuh dari masyarakat tentang vaksinasi. Dalam konteks ini, tentu saja pilihan kebijakan dalam bentuk sanksi-sanksi hukum menjadi tidak tepat.

Dengan pemetaan ini, pilihan tentang model kebijakan, pihak-pihak yang akan dilibatkan, dan strategi percepatan pelaksanaan vaksinasi di daerah akan memiliki basis fondasional yang terukur. Sehingga energi daerah dapat diberdayakan secara proporsional dan efisien. Tentu saja, dengan tetap menghormati hak asasi manusia. □

**) Sahid Hadi, Peneliti Pusat Studi Hak Asasi Manusia dan Mahasiswa Magister Hukum UII*

Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terimakasih partisipasinya dalam menulis dan mengirimi artikel untuk SKH *Kedaulatan Rakyat*. Selanjutnya redaksi hanya menerima tulisan lewat email : opinikr@gmail.com dengan panjang tulisan antara 535 - 575 kata, dengan mengisi subjek mengenai isu yang ditulis serta jangan lupa menampilkan fotocopy identitas. Terimakasih.

Pikiran Pembaca



Pikiran Pembaca terbuka bagi siapa saja. Naskah dikirim ke kantor Redaksi Kedaulatan Rakyat, Jalan Margo Utomo (P Mangkubumi) 40-42 Yogyakarta 55232 Fax (0274) 563125 Telp (0274) 565685 (Hunting) atau melalui email pikiranpembaca@gmail.com. Naskah dilengkapi fotokopi atau scan identitas diri berikut nomor telepon yang bisa dihubungi. Isi tanggung jawab penulis.

Membangkitkan Minat Baca Siswa

MINAT baca di Indonesia masih tergolong rendah bila dibandingkan dengan negara lain. Rendahnya minat baca ini tak lepas dari kurangnya semangat membaca. Membaca memang menjadi keterampilan yang lebih tinggi tingkatannya jika dibandingkan dengan keterampilan berbicara dan menyimak.

Rendahnya minat baca disebabkan banyak faktor, salah satunya adalah kurangnya semangat membaca. Hal ini tentu saja berkaitan dengan rendahnya motivasi dalam diri setiap orang. Upaya untuk membangkitkan semangat membaca bisa dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya adalah melalui guru di Sekolah Dasar.

Guru SD memegang peranan penting dalam membangkitkan semangat membaca para siswa. Dalam konteks ini, guru SD diharapkan dapat menciptakan suasana yang mendukung bagi terciptanya semangat membaca para siswa. Melalui penugasan membaca, siswa akan dilatih untuk memiliki semangat membaca. Tugas ini dapat berbentuk latihan membaca, meringkas, membuat sinopsis maupun menceritakan kembali sebuah bacaan.

Perpustakaan sekolah juga merupakan sarana penting untuk membangkitkan semangat mem-

baca para siswa SD. Perpustakaan yang menarik dengan layanan yang mampu membangkitkan semangat membaca akan lebih mendukung bagi terciptanya budaya baca di SD.

Siswa yang berbondong-bondong mendatangi perpustakaan dengan penuh kesadaran akan pentingnya membaca akan menjadi indikator yang menyenangkan bagi tumbuh kembangnya minat baca. Di sini para guru SD diharapkan dapat memotivasi siswa agar mencintai perpustakaan dengan aktivitas membaca.

Berbagai lomba yang terkait dengan semangat membaca dapat dilakukan dalam berbagai event sekolah seperti lomba membaca puisi, geguritan, lomba pidato, lomba mading, dan sebagainya. Di sini, lagi-lagi peran guru SD sangat dibutuhkan untuk mendesain berbagai model pembelajaran yang dapat menggugah semangat membaca siswa. Membangkitkan semangat membaca di SD merupakan usaha yang tepat dalam menciptakan minat baca sejak dini. Harapannya, anak tumbuh dan berkembang dengan semangat membaca yang baik, sehingga pada gilirannya dapat meningkatkan minat baca. □

**) Indah Anggraini, Prodi PGSD Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogya.*

Memantik Partisipasi Pemilih

Aminuddin

KPU telah mematok 77,5% partisipasi pemilih pada pilkada 2020. Angka tersebut sama dengan yang ditargetkan saat pilkada 2018 lalu. Dengan kondisi yang ada saat ini, tidak sedikit yang pesimis bahwa KPU terlalu 'PD' Mengapa?

Jelas. Situasi pilkada 2018 lalu dan akhir tahun ini berbeda. Pada pilkada 2018 tidak ada pandemi Covid-19. Sedangkan pilkada 2020 diselimiti kekhawatiran terjadinya kluster baru pandemi. Inilah yang membuat pemilih enggan ke tempat pemungutan suara (TPS). Sehingga akan berpengaruh terhadap partisipasi pemilih.

Seperti diketahui, pilkada yang akan berlangsung 9 Desember 2020 diikuti 270 daerah. Jika dibandingkan dengan jumlah yang terlibat di tahun 2018 silam yang hanya 171 daerah, tentu saja KPU boleh optimis untuk meraup partisipasi hingga 77,5%. Namun jika belajar pada pelaksanaan di tiga gelombang pilkada, partisipasi pemilih cenderung fluktuatif. Misalnya partisipasi pilkada 2015 hanya tercatat 70%, gelaran pilkada 2017 mencapai 74,20%, terakhir pada 2018 turun menjadi 73,24%. Padahal, di tiga gelombang pilkada sebelumnya tidak diwarnai oleh wabah Covid-19.

Dua Unsur

Secara ideal, hajatan pilkada bisa dibalang berhasil jika memenuhi dua unsur kuantitatif dan kualitatif. Unsur kuantitatif meniscayakan partisipasi publik dalam upaya memilih calon pemimpin yang sudah tersedia. Sedangkan unsur kualitatif dapat dilihat jika publik tidak hanya datang ke TPS saja, namun berperan aktif pemilih dalam setiap tahapan dan rasionalitas pilihan. Secara substansial, sebuah pemilihan dikatakan berhasil apabila berlangsung dengan damai tanpa kekerasan, ancaman dan intimidasi sebagaimana yang diamanatkan konstitusi dan Undang-Undang, serta terselenggara secara

luber dan jurdil. Apabila dari segi proses standar-standar normatif tersebut terpenuhi, dengan sendirinya dapat mendorong motivasi dan antusiasme masyarakat untuk berpartisipasi karena ada *trust* yang terbangun (Samsul Arif, 2020).

Namun perlu dicatat bahwa pilkada dan pandemi merupakan dua hal yang bertolak belakang. Hajatan pilkada meniscayakan partisipasi publik. Publik harus didorong untuk terlibat dalam proses pemilihan. Sedangkan pandemi Covid-19 memusutkan absensi publik untuk memutus mata rantai penyebaran. Dua hal berlawanan inilah yang membuat hajatan pilkada menjadi sangat dilematis.

Bagaimanapun juga, nasi sudah menjadi bubur. KPU sudah mematok pilkada tetap digelar. KPU juga sudah mematok partisipasi pemilih hingga 77,5%. Dengan demikian, tugas yang harus diemban oleh KPU adalah memantik para pemilih agar berpartisipasi. Semakin banyak partisipasi pemilih, otomatis menguatkan legitimasi kepala daerah yang terpilih. Partisipasi pemilih yang menggunakan hak pilih merupakan salah satu tolok ukur keberhasilan sebuah pemilihan, entah itu pemilu maupun pilkada. Pada saat sistem pembagian kekuasaan kita telah bertransformasi dari sentralistik ke desentralistik, maka kepala daerah yang dipilih langsung idealnya memiliki legitimasi cukup kuat (Riewanto, 2007).

Mensosialisasikan

Guna memastikan partisipasi pemilih terjaga, atau bahkan melampaui ekspektasi yang sudah ditetapkan, KPU harus men-

sosialisasikan teknik pemilihan. KPU memaparkan secara jelas dan detail kepada publik bahwa gelaran pilkada sudah memenuhi protokol kesehatan. Langkah ini penting dilakukan untuk memastikan publik terjamin kesehatannya. Selama ini, penyelenggara pilkada hanya sibuk mensosialisasikan pentingnya partisipasi pilkada. Padahal yang dibutuhkan saat ini adalah memastikan bahwa dalam hajatan pilkada, ada jaminan keselamatan pemilihan.

Selain itu, penyelenggara pilkada harus mengubah cara pandang proses pemilihan kepala daerah. Cara pandang yang dimaksud bahwa, pelaksanaan pemilihan dan proses pemilihan dilaksanakan dengan suasana normal baru. Dengan demikian, publik akan mempersiapkan diri sejak dini untuk memungut suara dalam keadaan normal baru pula. Minimal mempersiapkan secara mandiri 3M : mengenakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak tanpa harus diingatkan. □

Aminuddin, pemerhati politik dan demokrasi.

Pojok KR

Jalur evakuasi terus diperbaiki.
-- Tidak ada kata terlambat.

Batik berikan nyawa pada sebuah kain.
-- Tambah elegan juga pemakainya.

Pariwisata bangkit di tengah pandemi.
-- Semua sektor juga harus bangkit.



Kedaulatan Rakyat

SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) No. 127/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990. Anggota SPS. ISSN: 0852-6486.

Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, Terbit Perdana: Tanggal 27 September 1945.

Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).

Penerbit: Dr H Soemadi M Wonohito SH (1985-2008), dr H Gun Nugroho Samawi (2011-2019) **Penasihat:** Drs HM Idham Samawi. **Komisaris Utama:** Prof Dr Inajati Adrisjanti. **Direktor Utama:** M Wirmon Samawi SE MIB. **Direktur Pemasaran:** Fajar Kusumawardhani SE. **Direktur Keuangan:** Imam Satriadi SH. **Direktur Umum:** Yurika Nugroho Samawi SE MM MSc. **Direktor Produksi:** Bakoro Jati Prabowo SSoS.

Pemimpin Umum: M Wirmon Samawi SE MIB. **Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab:** Drs H Octo Lampito MPd. **Wakil Pemimpin Redaksi:** Drs H Ahmad Luthfie MA. **Romy Sugiantoro SPd, SE, MM. Redaktur Pelaksana:** Primaswolo Sudjono SPT, Joko Budhiarto, Mუსahada. **Manajer Produksi Redaksi:** Ngabdul Wakid. **Redaktur:** Drs Widyo Suprayogi, Dra Hj Fadmi Sustiwi, Dra Prabandari, Isnawan, Benny Kusumawan, Drs H Hudono SH, Drs Swasto Dayanto, Husein Effendi SSI, Hanik Atfiati, MN Hassan, Drs Jayadi K Kastari, Subchan Mustafa, Drs Hasto Sutadi, Muhammad Fauzi SSoS, Drs Mukti Haryadi, Retno Wulandari SSoS, H M Sobirin, Linggar Sumukti, Drs Sihono HT, Agung Purwandono. **Fotografer:** Effy Widjono Putro, Surya Adi Lesmana. **Grasis:** Joko Santoso SSn, Bagus Wijanarko. **Sekretaris Redaksi:** Dra Hj Supriyatin.

Pemimpin Perusahaan: Fajar Kusumawardhani SE. **Kepala TU Langganan:** Drs Asri Salman, Telp (0274)- 565685 (Hunting)

Manajer Iklan: Agung Susilo SE, Telp (0274) - 565685 (Hunting) Fax: (0274) 555660. E-mail: iklan@kr.co.id, iklankrkryk23@yahoo.com, iklankrkryk13@gmail.com.

Langganan per bulan termasuk 'Kedaulatan Rakyat Minggu'.. Rp 90.000,00, Iklan Umum/Display..Rp 27.500,00/mm klm, Iklan Keluarua...Rp 12.000,00/mm klm, Iklan Baris/Cilik (min. 3 baris, maks. 10 baris) .. Rp 12.000,00 / baris, Iklan Satu Kolom (min. 30 mm, maks. 100 mm) Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Khusus: Ukuran 1 klm x 45 mm .. Rp 210.000,00, (Wisuda lulus studi D1 s/d S1, Pernikahan, Ulang Tahun) ● Iklan Warna: Full Colour Rp 51.000,00/mm klm (min. 600 mm klm), Iklan Kuping (2 klm x 40 mm) 500% dari tarif. Iklan Halaman I: 300 % dari tarif (min. 2 klm x 30 mm, maks. 2 klm x 150 mm). Iklan Halaman Terakhir: 200% dari tarif. Tarif iklan tersebut belum termasuk PPN 10%

Alamat Kantor Utama dan Redaksi: Jalan Margo Utomo 40, Gowongan, Jetis, Yogyakarta, 55232. Fax (0274) - 563125, Telp (0274) - 565685 (Hunting) **Alamat Percetakan:** Jalan RayaYogya - Solo Km 11 Sleman Yogyakarta 55573, Telp (0274) - 496549 dan (0274) - 496449. Isi di luar tanggungjawab peretakan

Alamat Homepage: <http://www.kr.co.id> dan www.krjogja.com. **Alamat e-mail:** naskahkr@gmail.com. **Radio :** KR Radio 107.2 FM. **Bank:** Bank BNI - Rek: 003.0440.854 Cabang Yogyakarta.

Perwakilan dan Biro: **Jakarta:** Jalan Utan Kayu No. 104B, Jakarta Timur 13120, Telp (021) 8563602/Fax (021) 8500529. **Kuasa Direksi:** Ir Ita Indirani. Wakil Kepala Perwakilan: Hariyadi Tata Raharja.

Wartawan : H Imong Dewanto (Kepala Biro), H Ishaq Zubaedi Raqib, Syaifullah Hadmar, Muchlis Ibrahim, Rini Suryati, Ida Lumongga Ritonga. **Semarang :** Jalan Lampersari No.62, Semarang, Telp (024) 8315792. Kepala Perwakilan: Budiono Isman, Kepala Biro : Isdiyanto Isman SIP. **Banyumas :** Jalan Prof Moh Yamin No. 18, RT 7 RW 03 Karangklesem, Purwokerto Selatan, Telp (0281) 622244. Kepala Perwakilan: Ach Pujiyanto SPd. Kepala Biro : Driyanto.

Klaten : Jalan Pandanaran Ruko No 2-3, Bendogantungan Klaten, Telp (0272) 322756. Kepala Perwakilan dan Kepala Biro : Sri Warsiti. **Magelang :** Jalan Achmad Yani No 133, Magelang, Telp (0293) 363552. Kepala Perwakilan: Sumiyarsih, Kepala Biro : Drs M Thoha. **Kulonprogo :** Jalan Veteran No 16, Wates, Telp (0274) 774738. Kepala Perwakilan : Suprpto, SPd Kepala Biro : Asrul Sani.

Gunungkidul : Jalan Sri Tanjung No 4 Purwosari, Wonosari, Telp (0274) 393562. Kepala Perwakilan: Drs Guno Indarjo.